



Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024. Adapun Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2024.




Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, baik secara substansi perencanaan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Palembang, 13 Agustus 2024
Kepala,



YOSSI HERVANDI, SE., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
Pth. Sekretaris Badan	
Kasub. Bidang Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024. Adapun Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, baik secara substansi perencanaan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Palembang, 13 Agustus 2024
Kepala,



YOSSI HERVANDI, SE., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198208162001121004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
2.1 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB V PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rincian Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera selatan.....	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	18
Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja BPKAD.....	21
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	27
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap OPD dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Adapun dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan *output* dan memberikan *outcome* yang mendukung pencapaian target Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 selama Triwulan 1 sampai dengan Triwulan II.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkesinambungan.

- a. Menyediakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Berisikan Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan II. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan, Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari proses evaluasi tersebut dapat teridentifikasi dua hal yaitu, sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun- tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditunjang dengan belanja daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Belanja ini dianggarkan sebesar Rp40.950.443.413,00 dan sampai triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12.711.331.698,00 (31,04%).

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja ini dianggarkan sebesar Rp4.404.802.968.019,00 dan sampai triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.455.255.582.951,92 (33,04%).

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Belanja ini dianggarkan sebesar Rp6.193.400.000,00 dan sampai triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp213.426.874,00 (3,45%).

2.1 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 telah dilakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun rincian dari revisi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rincian Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2023	PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2024	PERGUB NOMOR 08 TAHUN 2024
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	104.092.253.397,00	40.950.443.413,00	40.950.443.413,00
	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	389.500.000,00	590.500.000,00	590.500.000,00
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.500.000,00	550.500.000,00	550.500.000,00
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.337.176.386,00	24.940.881.000,00	24.865.653.000,00
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85.242.789.386,00	20.114.354.000,00	20.114.354.000,00
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.909.547.000,00	3.235.687.000,00	3.160.459.000,00
	5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	969.840.000,00	969.840.000,00	969.840.000,00
	6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	128.500.000,00	128.500.000,00
	8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	215.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
	9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.040.000.000,00	782.758.000,00	782.758.000,00
	10 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
	11 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	770.000.000,00	427.758.000,00	427.758.000,00
	12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
	iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.250.000,00	343.250.000,00	343.250.000,00
	13 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	203.250.000,00	203.250.000,00	203.250.000,00
	14 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.134.000.000,00	8.479.720.000,00	8.554.948.000,00
	16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.700.000.000,00	3.300.000.000,00	3.375.228.000,00
	18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.900.000.000,00	1.945.720.000,00	1.945.720.000,00
	19 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00
	20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2023	PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2024	PERGUB NOMOR 08 TAHUN 2024
1	2	3	4	5
	21 Fasilitas Kunjungan Tamu	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	23 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	156.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
	24 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	568.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.552.800.000,00	1.552.800.000,00	1.552.800.000,00
	25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.512.800.000,00	1.512.800.000,00	1.512.800.000,00
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.295.527.011,00	4.260.534.413,00	4.260.534.413,00
	27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	933.767.000,00	933.767.000,00	933.767.000,00
	28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.238.300,00	359.238.300,00	359.238.300,00
	29 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
	30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.102.521.711,00	2.067.529.113,00	2.067.529.113,00
ii	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.040.699.531.044,00	4.438.182.163.019,00	4.404.802.958.019,00
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.315.000.000,00	4.340.000.000,00	4.340.000.000,00
	31 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00
	32 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	240.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00
	33 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	925.000.000,00	925.000.000,00	1.375.000.000,00
	34 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	875.000.000,00	875.000.000,00	425.000.000,00
	35 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.985.000.000,00	1.985.000.000,00	1.985.000.000,00
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.133.000.000,00	1.317.742.000,00	1.317.742.000,00
	36 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	399.500.000,00	459.500.000,00	333.000.000,00
	37 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	419.500.000,00	459.500.000,00	586.000.000,00
	38 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	314.000.000,00	398.742.000,00	398.742.000,00
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.798.000.000,00	5.053.722.129,00	5.053.722.129,00
	39 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	500.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00
	40 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	3.698.722.129,00	3.698.722.129,00
	41 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	75.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2023	PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2024	PERGUB NOMOR 08 TAHUN 2024
1	2	3	4	5
42	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	296.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00
43	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	427.000.000,00	401.000.000,00	401.000.000,00
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.102.000.000,00	1.364.500.000,00	1.364.500.000,00
44	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	278.000.000,00	474.500.000,00	474.500.000,00
45	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00
46	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	384.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.031.351.531.044,00	4.426.106.198.890,00	4.392.727.003.890,00
47	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
48	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.603.827.801.085,00	2.338.787.045.636,00	2.340.787.045.636,00
49	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	200.349.631.847,00	100.000.000.000,00	64.620.805.000,00
50	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	2.227.174.098.112,00	1.984.619.153.254,00	1.984.619.153.254,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.250.400.000,00	6.193.400.000,00	6.193.400.000,00
i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.250.400.000,00	6.193.400.000,00	6.193.400.000,00
51	Penyusunan Standar Harga	522.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00
52	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
53	Penatausahaan Barang Milik Daerah	247.200.000,00	238.200.000,00	238.200.000,00
54	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.654.000.000,00	2.264.000.000,00	2.264.000.000,00
55	Penilaian Barang Milik Daerah	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
56	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	784.000.000,00	784.000.000,00	784.000.000,00
57	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	997.800.000,00	997.800.000,00	997.800.000,00
58	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	610.400.000,00	958.400.000,00	958.400.000,00
59	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00
	Jumlah : 59 sub kegiatan	4.151.042.184.441,00	4.485.326.006.432,00	4.451.946.811.432,00

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini		Narasas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Terbilang Fisik (%)		
			Target (%)	Realisasi (%)		Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
							Target Kinerja s.d. Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja		Realisasi Fisik (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.950.443.413,00	4	31,04	12.711.331.698,00	1	6	100	9	10	11	48,41
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	590.500.000,00	100	18,07	106.700.000,00			100				57,63
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	100	0,00	0,00			100				1,69
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.500.000,00	100	19,38	106.700.000,00			100		8 Laporan		55,94
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.865.653.000,00	100	39,73	9.878.400.839,00			100				47,64
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.114.354.000,00	100	42,06	8.460.402.889,00			100		85 ASN/Bulan		40,45
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.160.459.000,00	100	34,79	1.099.390.000,00			100		5 ASN, 85 Non ASN		5,08
5	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	969.840.000,00	100	21,97	213.120.000,00			100		3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator		0,90
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	112.500.000,00	100	0,00	0,00			100		10 Dokumen		0,24
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	128.500.000,00	100	46,52	59.782.500,00			100		1 Dokumen	1 Dokumen	0,37
8	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	270.000.000,00	100	16,93	45.705.450,00			100		3 Laporan	1 Laporan	0,31
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	110.000.000,00	100	0,00	0,00			100		3 Laporan		0,30

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini		Narasi	Indikator Kinerja, Program/Kegiatan (Output/Output)				Terbilang Fisik (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		Realisasi (Rp)	Target Fisik (%)	Target Kinerja Akhir Tahun	Realisasi Fisik (%)	
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	782.758.000,00	100	28,26	221.208.295,00	7	100	0	58,12	43,11
10	Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000,00	100	81,93	221.208.295,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	81,93	28,26
11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	427.758.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	11,00	6,01
12	Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	85.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	81,42	8,84
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.250.000,00	100	1,94	6.650.000,00	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		58,33	55,54
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	203.250.000,00	100	3,27	6.650.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	3 Laporan	50,00	29,61
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Laporan	7 Laporan	60,00	6,99
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	15 Orang	65,00	18,94
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.554.948.000,00	100	18,69	1.599.097.300,00	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		47,78	49,14
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000,00	100	49,56	198.242.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41 Jenis	20 Jenis	50,00	2,34
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.375.228.000,00	100	2,24	75.610.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scamer, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	50,00	19,73
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.945.720.000,00	100	43,85	853.182.800,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	5 Jenis Alat Pembersih dan 25 Jenis Bahan Pembersih	50,00	11,37
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.060.000.000,00	100	35,13	372.382.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	50,00	6,20

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini		Narasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		Realisasi Fisik s.d. Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
	20	100.000.000,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar	100	7 Surat Kabar	50,00	0,58
	21	250.000.000,00	39,87	99.680.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000 Tamu	100	5.000 Tamu	50,00	1,46
	22	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	100	150 kali dalam daerah, 150 kali luar daerah	50,00	5,84
	23	54.000.000,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	100	-	50,00	0,32
	24	370.000.000,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Aplikasi	100	-	30,00	1,30
vi		1.552.800.000,00	25,40	394.468.493,00	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	600 surat	50,00	50,00
	25	40.000.000,00	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 surat	100	600 surat	50,00	1,29
	26	1.512.800.000,00	26,08	394.468.493,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	100	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	50,00	48,71
vii		4.260.534.413,00	11,85	504.806.771,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	-	50,00	50,00
	27	933.767.000,00	14,43	134.741.271,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Roda 4, 19 Roda 2	100	14 Roda 4, 8 Roda 2	50,00	10,96
	28	359.238.300,00	0,00	0,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	18 Roda 4, 1 Roda 2	100	9 Roda 4, 1 Roda 2	50,00	4,22
	29	900.000.000,00	35,57	320.115.500,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	100	1 jenis peralatan dan mesin lainnya	50,00	10,56

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini				Terbilang Fisik (%)
			Target (%)	Realisasi			Target Fisik (%)	Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)						
I	30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.067.529.113,00	100	2,42	49.950.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Rumah Dinas	100	-	50,00	24,26
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.404.802.968.019,00	100	33,04	1.455.255.582.951,92	APBD yang Tepat Waktu	100	100	23,14	34,23	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.340.000.000,00	100	3,52	152.889.000,00	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	100	11,84	12,65	
	31 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	290.000.000,00	100	20,17	58.481.000,00	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	100	-	22,23	1,49
	32 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	265.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	100	-	6,90	0,42
	33 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.375.000.000,00	100	6,14	84.358.000,00	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Pergub dan 100 Buku Pergub	100	-	11,00	3,49
	34 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	425.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Pergub dan 100 Buku Pergub	100	-	4,05	0,40
	35 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.985.000.000,00	100	0,51	10.050.000,00	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	100	-	15,00	6,86
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.317.742.000,00	100	4,11	54.189.500,00	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-	11,33	12,45
	36 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	333.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 SK	100	-	5,00	1,26

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini		Narasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)		
			Target (%)	Realisasi (%)		Realisasi Fisik s.d. Bulan ini	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
							Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1												
37	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	586.000.000,00	100	9,25	54.189.500,00	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 SK	100	-	17,00	7,56	
38	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	398.742.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	17 SK	100	-	12,00	3,63	
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	5.053.722.129,00	100	2,81	141.936.987,00	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	100	100	-	18,00	19,56	
39	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	510.000.000,00	100	13,34	68.050.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Laporan	100	4 Laporan	20,00	2,02	
40	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3.698.722.129,00	100	1,46	53.836.987,00	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Pencairan SMI	100	Dokumen Pencairan SMI	20,00	14,64	
41	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	108.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	100	-	15,00	0,32	
42	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	336.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	100	-	15,00	1,00	
43	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	401.000.000,00	100	5,00	20.050.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 OPD	100	-	20,00	1,59	
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.364.500.000,00	100	0,00	0,00	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	-	33,46	32,87	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini		Narasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Terbilang Fisik (%)	
			Target (%)	Realisasi (%)		Realisasi (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	474.500.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	617 Buku	100	-	20,00	6,95
45	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	440.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tekonsolidasi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	100	-	80,00	25,80
46	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	450.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	100	-	0,37	0,12
47	Penunjang Unsur Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.392.727.003.890,00	100	33,12	1.454.906.567.464,92	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	-	41,08	34,28
48	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.700.000.000,00	100	79,58	2.148.701.935,00	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	100	SMI	85,00	0,05
49	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.340.787.045.636,00	100	24,36	570.181.681.409,82	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	100	17 Kab/Kota	25,00	13,32
50	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	64.620.805.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 Kab/Kota	100	-	8,33	0,12
51	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.984.619.153.254,00	100	44,47	882.576.184.120,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 Kab/Kota	100	17 Kab/Kota	48,00	20,78
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.193.400.000,00	100	3,45	213.426.874,00	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	-	24,54	24,54
i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.193.400.000,00	100	3,45	213.426.874,00	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	-	24,54	13,59
	Penyusunan Standar Harga	465.000.000,00	100	34,41	160.015.000,00	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku, 40 OPD	100	2 Buku, 40 OPD	45,00	3,38

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini		Narasi	Indikator Kinerja, Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)	
			Target (%)	Realisasi (%)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja		Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	65.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Laporan	100	-	1,00	0,01
53	Penatausahaan Barang Milik Daerah	238.200.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Asas	100	-	30,00	1,15
54	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.264.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	40 OPD	100	-	1,27	0,46
55	Penilaian Barang Milik Daerah	270.000.000,00	100	19,78	53.411.874,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	80 Laporan Penilaian BMD	100	50 Laporan Penilaian BMD	24,10	1,05
56	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	784.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	100	-	20,00	2,53
57	Optimalisasi Pengukuran, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	997.800.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengukuran, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 SK/MoLUPKS (Kerjasama)	100	-	4,50	0,72
58	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	958.400.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40 Laporan Rekon Periwulan, 40 BA Rekon BMD dg OPD dan 452 BA Rekon dg SMM/SMK/SLB	100	-	15,00	2,32
59	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	151.000.000,00	100	0,00	0,00	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	100	-	80,00	1,95
Jumlah : 59 sub kegiatan		4.451.946.811.432,00		32,98	1.468.180.341.523,92			100		48,67	34,35

Dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp4.451.946.811.432,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp1.468.180.341.523,92. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp2.983.766.469.908,08 (67,02%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Pasal 2 merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap Target dan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2022 (th. n-3)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	- Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu - <i>Budget Execution</i>			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum ada	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0% s.d 5%	0% s.d 5%	Laporan Keuangan-Organisasi Perangkat Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dikirim ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang akuntansi dan pelaporan
2	Persentase Dokumen Pencairan yang Sesuai dengan Aturan (Sisdur) dan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Kesesuaian antara Aset Lancar dan Aset Tetap dengan Catatan atas Laporan Keuangan dan Bukti Dokumen			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum ada	WTP	WTP	WTP	WTP	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (th. n-3)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
4	- Asset Management			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mengetahui kondisi aset, maka setelah data aset diinput dalam SIMDA BMD, kemudian akan dilakukan cek fisik terhadap aset tersebut.	
5	Persentase APBD/APBDP Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan benar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Laporan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas yang Didukung Aparatur Pemerintah yang Jujur, Berintegritas, Profesional, dan Responsif dengan indikator kinerja yaitu **"Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan"**, telah sesuai target, dimana realisasinya Provinsi Sumatera Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Rencana Kerja Tahun 2024 maupun Rencana Strategis Tahun 2022-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Perlunya pembinaan staf dalam mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian
2	Pelatihan teknis dibidang Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pelatihan teknis	Sumber Daya Manusia yang berminat mengikuti pelatihan teknis
3	Aset-aset Provinsi Sumsel yang belum bersertifikat	Aset yang tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	Status kepemilikan aset tanah tanah yang tumpang tindih dengan pihak lain
4	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) yang belum terselesaikan.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) yang lama belum terselesaikan	Banyaknya ASN dan Pegawai Pensiunan yang tidak disiplin membayar hutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR)
5	Sarana dan prasarana kerja	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Sarana dan prasarana belum ada Gudang kantor yang tetap
6	Disiplin aparatur	Kurangnya disiplin aparatur	Kurangnya pembinaan terhadap aparatur

Dari tabel di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya adalah penyelesaian aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, belum tersedianya data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Dari tabel di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan aset pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan banyak dikuasai masyarakat/tumpang tindih kepemilikan.
2. Aset rumah negara dikuasai oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang turun-temurun diteruskan oleh ahli waris.
3. Bukti kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak kuat/hanya memiliki *copy*.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Tim Aset dalam pengurusan aset pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam percepatan proses sertifikasi aset daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dalam pengamanan aset tanah dan rumah negara telah dilakukan proses pemasangan plang nama milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemagaran secara keliling.
3. Secara hukum pengamanan aset dilakukan proses sertifikasi melalui Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelola Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran.
3. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Melakukan inventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinamika regulasi bidang Pengelola keuangan yang berpengaruh terhadap pemahaman Sumber Daya Manusia, khususnya pelayanan administrasi keuangan yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan yang lebih akuntabel dalam mencapai *Good Governance*.
7. Optimalisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam Bidang Urusan Keuangan Daerah.

b. Peluang

1. Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD provinsi (pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
3. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
4. Adanya peluang investasi dari pihak asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan target Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

Berdasarkan analisis kritisal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelola keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.

3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelola keuangan kabupaten/kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Bagaimana meningkatkan optimalisasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
6. Bagaimana menerapkan pembentukan satuan tugas khusus penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Bagaimana meningkatkan daya dukung sarana prasarana.
8. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bagaimana meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas yang Didukung Aparatur Pemerintah yang Jujur, Berintegritas, Profesional, dan Responsif”

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mudah harus terukur dan kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, merupakan pelaksanaan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”**.

Untuk mendorong tercapainya visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengelola keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengelola keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjawab Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
			2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	
1.1 Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.1.1 Penganggaran yang Baik	a.	Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		b.	Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD	5% s.d 0%	5% s.d 0%	5% s.d 0%	5% s.d 0%
	1.1.2 Penatausahaan Keuangan yang Baik		Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	1.1.3 Pelaporan Keuangan yang Baik		Persentase Kesesuaian Antara Aset Lancar dan Aset Tetap dan Catatan atas Laporan Keuangan dan Bukti Dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
			2024	2025	2026	2027	
			(5)	(6)	(7)	(8)	
	1.1.4	Pengelola Aset yang Baik	(3)				
		a.	Asset Management	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
1.2	Kabupaten/Kota yang berkualitas mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.2.1	APBD Kabupaten/Kota yang Baik	100%	100%	100%	100%
		a.	Persentase APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	100%	100%	100%	100%
		b.	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.612.021.553.526,00	4.151.118.244.441,00	4.505.296.242.112,00		
5.02	KEUANGAN					3.612.021.553.526,00	4.151.118.244.441,00	4.505.296.242.112,00		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					127.964.350.833,00	104.108.313.397,00	43.310.343.413,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak					1.566.500.000,00	389.500.000,00	1.469.180.000,00	PAD	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak	2 Dokumen			115.000.000,00	0,00	0,00	PAD	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			122.500.000,00	0,00	0,00	PAD	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			127.500.000,00	0,00	0,00	PAD	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			127.500.000,00	0,00	0,00	PAD	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	40.000.000,00	177.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	811.500.000,00	349.500.000,00	1.292.180.000,00	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					108.386.047.000,00	89.353.236.386,00	23.546.953.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	103.767.200.000,00	85.242.789.386,00	17.883.354.000,00	DAU	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	2.909.647.000,00	2.909.647.000,00	3.568.559.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	885.800.000,00	985.800.000,00	1.040.840.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	-	10 Dokumen	65.000.000,00	0,00	203.500.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	239.500.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	403.400.000,00	215.000.000,00	306.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	-	3 Laporan	155.000.000,00	0,00	305.200.000,00	PAD	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Ssub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.333.843.000,00	1.040.000.000,00	776.028.000,00	PAD	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	PAD	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Save Deposit Box, 21 Unit, 20 Dokumen	15 Save Deposit Box, 21 Unit, 20 Dokumen	15 Save Deposit Box, 21 Unit, 20 Dokumen	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	770.000.000,00	315.028.000,00	PAD	
5.02.01.1.03.0006	Penelaahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	PAD	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan									
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Penelaahan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	4 Laporan	70.000.000,00	0,00	191.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 orang/setel (Baju Olahraga)	-	-	600.000.000,00	0,00	115.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	130.000.000,00	40.000.000,00	196.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	15 Orang	30 Orang	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	500.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perangkat Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perangkat Kantor yang Disediakan	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	3.501.600.000,00	2.700.000.000,00	4.540.228.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5 jenis alat pembersih dan 25 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	0,00	1.900.000.000,00	2.245.720.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Jenis yang dicetak	40 Jenis yang dicetak, 45 Counter	40 Jenis yang dicetak, 45 Counter	1.260.000.000,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	7 surat kabar	7 surat kabar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000 tamu	12.000 tamu	0,00	250.000.000,00	363.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	150 Kali Dalam Daerah dan 250 Kali Luar Daerah	300 Kali Dalam Daerah dan 250 Kali Luar Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumset	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumset	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumset	429.865.250,00	156.000.000,00	117.000.000,00	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Pagu Anggaran				Sumber Dana	Ket	
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024			Perubahan Renja 2024
1	2	3											
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	7 Aplikasi	7 Aplikasi	0,00	568.000.000,00	608.000.000,00	0,00	568.000.000,00	608.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.552.800.000,00	1.552.800.000,00	1.637.800.000,00	1.552.800.000,00	1.552.800.000,00	1.637.800.000,00	PAD	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.200 surat	1.200 surat	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	0,00	1.512.800.000,00	1.597.800.000,00	0,00	1.512.800.000,00	1.597.800.000,00	PAD	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.942.445.583,00	3.295.527.011,00	4.221.534.413,00	3.942.445.583,00	3.295.527.011,00	4.221.534.413,00	PAD	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	18 R4, 19 R2	18 R4, 19 R2	0,00	933.767.000,00	943.767.000,00	0,00	933.767.000,00	943.767.000,00	PAD	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzihan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzihannya	-	18 R4, 1 R2	18 R4, 1 R2	0,00	359.238.300,00	459.238.300,00	0,00	359.238.300,00	459.238.300,00	PAD	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 jenis peralatan dan mesin	2 jenis peralatan dan mesin	2 jenis peralatan dan mesin	1.200.086.472,00	900.000.000,00	980.000.000,00	1.200.086.472,00	900.000.000,00	980.000.000,00	PAD	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	1.102.521.711,00	1.102.521.711,00	1.838.529.113,00	1.102.521.711,00	1.102.521.711,00	1.838.529.113,00	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdug dan 100 buku Pergub	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdug dan 100 buku Pergub	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdug dan 100 buku Pergub	1.150.000.000,00	875.000.000,00	626.000.000,00	PAD	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.658.047.000,00	1.985.000.000,00	1.535.350.000,00	PAD	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					2.140.561.650,00	1.133.000.000,00	1.620.692.000,00	PAD	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	872.664.000,00	409.500.000,00	398.000.000,00	PAD	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	881.367.650,00	409.500.000,00	683.000.000,00	PAD	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	386.550.000,00	314.000.000,00	539.692.000,00	PAD	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah					5.628.140.700,00	2.798.000.000,00	2.003.722.129,00	PAD	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	790.850.000,00	500.000.000,00	626.000.000,00	PAD	

Perubahan Rencana Kerja BPKAD 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	SMI	SMI	SMI	3.276.187.700,00	1.500.000.000,00	214.722.129,00	PAD
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	290.968.000,00	75.000.000,00	326.000.000,00	PAD
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	553.510.000,00	296.000.000,00	341.000.000,00	PAD
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 OPD	40 OPD	40 OPD	716.625.000,00	427.000.000,00	496.000.000,00	PAD
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	617 Buku	617 Buku	617 Buku	1.832.830.000,00	1.162.000.000,00	1.432.500.000,00	PAD
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	617 Buku	617 Buku	617 Buku	658.700.000,00	378.000.000,00	480.500.000,00	PAD
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel	588.600.000,00	400.000.000,00	506.000.000,00	PAD

Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja	Target				Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024			
									4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perantangan Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perantangan Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperub tentang Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperub tentang Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperub tentang Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000,00	384.000.000,00	446.000.000,00	PAD		
5.02.02.1.05	Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					3.460.341.899.197,00	4.031.351.531.044,00	4.446.276.434.570,00	PAD		
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	17 Kab/Kota	0,00	0,00	2.900.000.000,00	PAD		
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	1.128.845.022.509,00	1.603.827.801.085,00	2.343.787.045.636,00	PAD		
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	16.000.000.000,00	200.349.631.847,00	51.240.814.409,00	PAD		
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	2.315.496.876.888,00	2.227.174.098.112,00	2.048.348.574.525,00	PAD		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					8.885.704.146,00	6.250.400.000,00	6.148.200.000,00	PAD		
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					8.885.704.146,00	6.250.400.000,00	6.148.200.000,00	PAD		
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 buku, 41 OPD	2 buku, 40 OPD	2 buku, 40 OPD	847.850.000,00	522.000.000,00	655.000.000,00	PAD		
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	50.000.000,00	25.000.000,00	121.000.000,00	PAD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja	Target				Pagu Anggaran				Sumber Dana	Ket
			Renja 2024		Perubahan Renja 2024		Renja 2024		Perubahan Renja 2024			
			4	5	6	7	8	9				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5.02.03.1.01.0005	Pentahasiswaan Barang Milik Daerah		40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	305.237.397,00	247.200.000,00	494.200.000,00	PAD			
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	2.739.000.000,00	2.654.000.000,00	1.881.700.000,00	PAD			
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	200 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	360.000.000,00	270.000.000,00	396.000.000,00	PAD			
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	1.825.316.749,00	784.000.000,00	730.000.000,00	PAD			
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 SK/MoLUPKS (kerjasama)	25 SK/MoLUPKS (kerjasama)	25 SK/MoLUPKS (kerjasama)	1.293.500.000,00	997.800.000,00	937.300.000,00	PAD			
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dengan OPD dan SMA/SMK/SLB	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dengan OPD dan SMA/SMK/SLB	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dengan OPD dan SMA/SMK/SLB	954.800.000,00	610.400.000,00	726.000.000,00	PAD			
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	310.000.000,00	140.000.000,00	207.000.000,00	PAD			
		Jumlah				3.612.021.553.526,00	4.151.118.244.441,00	4.505.296.242.112,00				

BAB V P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran Tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

2. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada triwulan empat Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024.